

IPTEKS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA

Regina Putri Hidayat¹, Miranda Ellora Kotambunan², Kezia Gabriela Saroinsong³,
Treesje Runtu⁴

^{1,2,3,4}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Unsrat, Manado, 95115, Indonesia

Email : reginah056@gmail.com

ABSTRACT

The Ministry of Finance especially the directorate general of the treasury of North Sulawesi province, is confronted with modern treasury problems. The demands of economic development are increasingly advanced, demanding a transition from the application of past culture (manual) to the stage of digital (modern) technology. The work process in the treasury sector changes, seen from the need for financial management information systems to improve the competitive advantage of modern DGT organizations in the future in increasing transparency and accountability in managing the world treasury. The emergence of treasury and state budget (SPAN) applications and agency-level financial application systems (SAKTI) as a manifestation of the implementation of financial management information systems in the Directorate General of Treasury and work units. For state treasury management to be carried out by the treasury general directorate, it can be aligned with treasury management by other countries in the world.

Keywords : Financial Management Information System, SPAN, and SAKTI.

1. PENDAHULUAN

Peradaban yang semakin maju memicu pertumbuhan dalam berbagai segi bidang kehidupan salah satunya yaitu dalam bidang perekonomian. Suatu negara yang maju memiliki tolak ukur pada keuangan dan kestabilan pemerintahan. Indonesia sekarang berada pada tahap perkembangan menuju ke negara maju, walaupun pencapaiannya secara bertahap. Dalam bidang keuangan Kemenkeu (Kementerian Keuangan) memiliki peran penting dalam pencapaian stabilitas keuangan negara. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi manajemen keuangan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif organisasi DJPb yang modern di masa depan demi meningkatkan transparansi dan akuntabel dalam pengelolaan perbendaharaan negara di tingkat dunia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Sistem Informasi Manajemen Keuangan. Artinya suatu sistem informasi yang memberikan informasi mengenai transaksi keuangan. Dapat dikatakan secara menyeluruh pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel dan transparansi di dukung dari adanya sistem informasi yang mampu meningkatkan kredibilitas dalam pengelolaan keuangan Negara.

Pengenalan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Sesuai Visi DJPb adalah Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang Unggul di Tingkat Dunia atau *To Be A World Class State Treasury Manager*.

Peranan Financial Management Information System di DJPb Provinsi Sulawesi Utara. Kemajuan perbendaharaan memicu Financial Management Information System menyediakan informasi tentang transaksi-transaksi keuangan untuk pengelolaan keuangan Negara yang simple, efisien, efektif, transparansi dan akuntabel berguna bagi stakeholders maupun DJPb.

Dalam hal ini financial management information system ditunjang dengan adanya aplikasi SPAN dan SAKTI di DJPb Sulut. Berdampak pada peningkatan pelayanan kepada publik yang lebih efektif dan prestasi DJPb Sulut.

3. METODE DAN TEKNIK PENERAPAN IPTEKS

3.1. Metode Penerapan Ipteks

Dalam sistem informasi manajemen keuangan menerapkan metode IPTEKS sesuai dengan *Standart Operation Procedure* yang terdapat pada SPAN dan SAKTI dengan adanya modul-modul.

3.2. Teknik Penerapan Ipteks

Teknik IPTEKS yang digunakan yaitu penerapan sistem informasi manajemen keuangan yang terdapat pada SPAN dan SAKTI sesuai dengan modul-modul yaitu penganggaran, pembayaran, anggaran, bendahara, aset tetap, komitmen, persediaan, dan APK.

4. PEMBAHASAN

4.2. Gambaran Objek Penerapan

Sebagai bentuk dari penerapan FMIS dibangun sebuah aplikasi SPAN. SPAN diresmikan oleh Presiden pada 29 April 2015 di Istana Negara. Saat ini SPAN telah digunakan oleh 2458 user di semua lingkup DJPb serta Satker BA-BUN. Selanjutnya, tahun 2018 direncanakan implemntasi SAKTI pada seluruh satker Kemenkeu dan ditargetkan di tahun 2020 seluruh Kementerian Lembaga untuk implementasikan SAKTI.

4.2. Pembahasan

Pengaplikasian FMIS berupa SPAN di DJPb Sulut telah berjalan sesuai fungsinya. Dalam output maupun penginputan data tidak ada kendala yang signifikan untuk Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara. Namun dalam pengaplikasian SAKTI di DJPb Sulut masih belum secara merata semua modul digunakan karena masih dalam proses pembelajaran. Adanya pelatihan secara bertahap dari Kantor Pusat Kementerian Keuangan, melalui perwakilan beberapa pihak dari divisi-divisi yang ditunjuk untuk melakukan pelatihan dalam kurun waktu kurang lebih 1 minggu. Dan hasil pelatihan diterapkan melalui penginformasian pembelajaran dalam pelatihan yang diikuti melalui presentasi ke DJPb masing-masing. Terkait capaian implementasi FMIS (*Financial Management Information Sistem*) khususnya yaitu SPAN dan SAKTI.

1. SPAN kini merupakan bagian dari modernisasi pengelolaan perbendaharaan negara yang menyediakan kebutuhan proses pelayanan.
2. SAKTI bisa diartikan sebagai Aplikasi Feeder untuk SPAN. Aplikasi dan basis data SPAN di integrasikan ke dalam aplikasi SAKTI yang selanjutnya digunakan oleh satuan kerja. Perancangan SAKTI dibuat begitu detail agar memungkinkan pengguna mengaplikasikannya. Data tersebut dikirim ke SPAN melalui sebuah portal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Kemajuan perbendaharaan memicu sistem inforamasi manajemen keuangan memiliki SAKTI dan SPAN. Adanya aplikasi ini diharapkan DJPb dapat menjadi pengelolaan perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia.

5.2. Saran

Adanya pelatihan secara berkala terhadap pengoperasian aplikasi SPAN dan SAKTI di lingkup DJPb Provinsi Sulawesi Utara. Pengontrolan secara berkala sangat penting diterapkan agar aplikasi yang ada dapat dijalankan sesuai dengan tugas dan fungsi yang

diharapkan karena dilihat dari segi produktivitas tenaga kerja dalam proses transisi menuju ke arah modernisasi teknologi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Nicho, Eka. 2017. *Sistem Informasi Manajemen Keuangan* dalam <http://nichonotes.blogspot.com/2017/12/sistem-informasi-manajemen-keuangan.html>, diakses 20 November 2018.
- PER-50 /PB /2016 tentang Pedoman Umum Tugas Pelaksanaan Manajemen Satuan Kerja pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
- Salim, Adi. *Overview PMK-223/PMK.05/2015 dan Standar Operasional Prosedur SAKTI* dalam <https://slideplayer.info/slide/12060872/>, diakses 20 November 2018.
- Santi, Gideon. 2013. *Sistem Informasi Manajemen Keuangan dalam Pengambilan Keputusan Investasi pada PT. Bank Sulut Cabang Marina Plaza*. Jurnal EMBA. Vol 1 No 3.
- SPAN. 2015. *Media Komunikasi Peluncuran SPAN* dalam <http://www.span.depkeu.go.id/content/media-komunikasi-peluncuran-span>, diakses 20 November 2018.
- SPAN. 2017. *Standard Operating Procedure SAKTI : Sebuah Langkah Maju Menuju Implementasi SAKTI* dalam <http://www.span.depkeu.go.id>, diakses 20 November 2018.
- Republik Indonesia, KEP 151/PB/2013 tentang SOP Piloting SPAN.
- Republik Indonesia, KEP 666/PB/2017 tentang Blueprint Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2018-2025.
- Republik Indonesia, PER 20/PB/2016 tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- The World Bank. 2015. *Pembaharuan Sistem Informasi Manajemen di Kementerian Keuangan demi Transparansi, Efisiensi dan Akuntabilitas*. Dalam <http://www.worldbank.org/in/news/press-release/2015/04/29/new-financial-management-information-system-at-finance-ministry-to-improve-transparency-efficiency-and-accountability>, diakses 20 November 2017.
- Tuhumury, Bebbby S.F. *Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar II*. Jurnal Administrasi Publik.
- Wikiapbn. 2014. *Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* dalam <http://www.wikiapbn.org/sistem-perbendaharaan-dan-anggaran-negara/>, diakses 20 November 2018